



KEMENTERIAN
SEKRETARIAT
NEGARA

LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK 2025



BerAKHLAK  bangga
melayani
bangsa

80 Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju



Biro Organisasi, Tata Laksana, Hukum, dan
Reformasi Birokrasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia, sehingga dapat diselesaikan laporan pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Kementerian Sekretariat Negara yang dilaksanakan tahun 2025.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan standar pelayanan yang terdapat di Kementerian Sekretariat Negara. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari akademisi, stakeholder, pengguna layanan, dan penyelenggara layanan di Kementerian Sekretariat Negara.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga laporan dan hasil evaluasi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi penyelenggaraan pelayanan publik pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

Jakarta, 15 Desember 2025

Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,
Hukum, dan Reformasi Birokrasi,

Agussalim



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
A. Latar Belakang	1
B. Analisis Pelaksanaan FKP	2
C. Rencana Aksi	5
D. Kesimpulan	5
Lampiran I	6
Lampiran II	17

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya perlibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Kementerian Sekretariat Negara.

B. ANALISIS PELAKSANAAN FKP

Sebagai tindak lanjut terhadap Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah, Kementerian Sekretariat Negara melalui memorandum Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, Hukum, dan Reformasi Birokrasi Nomor M-35/Ortala-HRB/OT.01.01/11/2025, telah mengoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan FKP seluruh unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kementerian Sekretariat Negara.

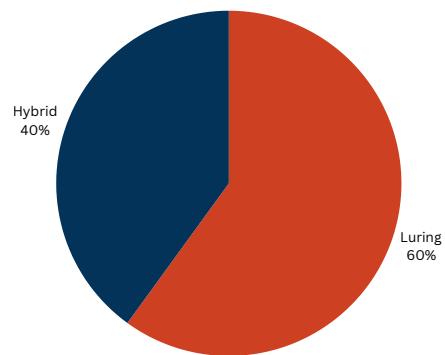
Berdasarkan hasil pelaksanaan FKP Unit Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, telah dilaksanakan rekapitulasi laporan FKP dari sebanyak 5 UPP yang telah menyampaikan laporan. Selanjutnya, analisis hasil kegiatan FKP yang dilaksanakan berdasarkan 8 (delapan) aspek, sebagai berikut.

1. Sumber Input

Sumber input merupakan sumber data atau informasi berupa saran, masukan, ataupun pengaduan yang digunakan sebagai dasar pembahasan dalam FKP. Seluruh UPP menggunakan sumber input berupa observasi lapangan, hasil Survei Kepuasan Masyarakat, pertemuan stakeholder, media sosial, berbagai kanal pengaduan (SP4N-LAPOR!), dan berbagai data lainnya.

2. Bentuk Penyelenggaraan

Bentuk penyelenggaraan FKP yang dilakukan oleh 5 UPP di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dilakukan secara luring tatap muka (3 unit kerja) dan *hybrid* (2 unit kerja) yang mendapatkan respon baik dari peserta (kementerian/lembaga/daerah/instansi terkait).



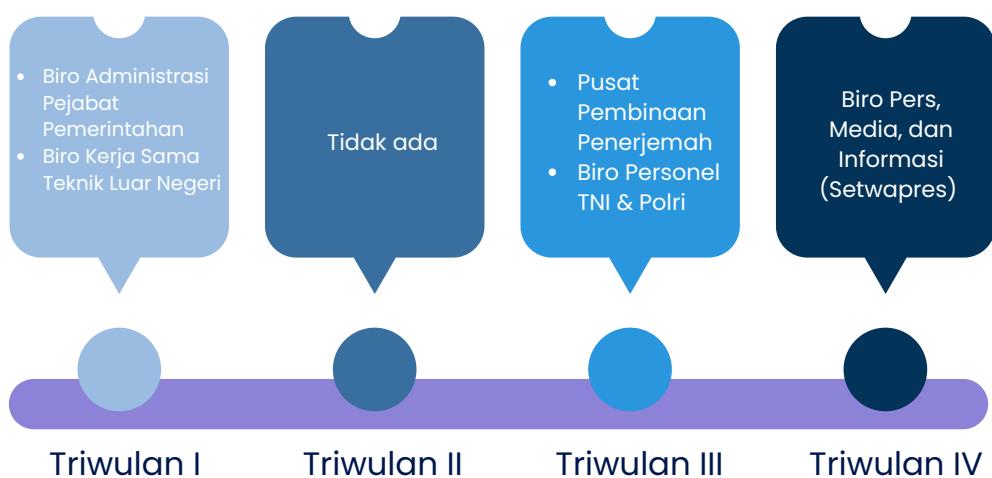
3. Ruang Lingkup Forum Konsultasi Publik

Ruang Lingkup FKP adalah ruang lingkup pembahasan dan pemecahan masalah dari tema yang dibahas dalam pelaksanaan FKP. Pada tahun 2025, Kementerian Sekretariat Negara melaksanakan FKP dengan tema:

- Meningkatkan pelayanan pers dan media yang diselenggarakan oleh seluruh pegawai di Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Wakil Presiden;
- Peluncuran Jurnal Penerjemah Online tahun 2025;
- Sosialisasi komunikasi akun media sosial Biro APP dan aplikasi SIAPP kepada civitas akademika Universitas Mercu Buana Jakarta;
- Rapat pembahasan tentang perubahan tahun lahir pada akte kelahiran untuk memberikan penjelasan terkait pelaksanaan perubahan data pokok pegawai di lingkungan TNI & Polri; dan
- Diskusi Standar Pelayanan Administrasi PDLN termasuk waktu layanan, persyaratan, biaya non-tarif, mekanisme perizinan, dan kanal layanan.

4. Waktu Pelaksanaan

Pada Tahun 2025 sebagian UPP melaksanakan FKP pada Triwulan I sebanyak 2 Unit Layanan (40%), Triwulan III sebanyak 2 Unit Layanan (40%), dan Triwulan IV sebanyak 1 Unit Layanan (20%).



5. Tim Forum Konsultasi Publik

Tim FKP adalah pejabat/pegawai yang ditugaskan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan FKP dan ditetapkan dengan Surat Keputusan/Surat Perintah dari pimpinan unit kerja masing-masing.

6. Pihak yang Terlibat

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan FKP di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, di antaranya adalah sebagai berikut:

- penyelenggara layanan;
- pengguna layanan;
- stakeholder pelayanan publik;
- ahli/pakar;
- akademisi; dan
- Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

7. Hasil/Kesimpulan/Rekomendasi

Hasil/kesimpulan/rekomendasi dari pelaksanaan FKP yang dilaksanakan oleh UPP secara garis besar meliputi:

- perlunya penambahan mitra pelaksana/kerja sama terkait penyebarluasan informasi layanan, pelaksanaan pelatihan, serta produksi konten digital;
- pemanfaatan kanal digital dalam upaya memperluas jaringan audiens, optimalisasi penyebarluasan informasi layanan, serta sebagai media pelaksanaan pelatihan;
- penyesuaian konten digital dengan kebutuhan pengguna layanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar informasi layanan yang disampaikan tepat guna dan tepat sasaran; dan
- perlunya penggunaan teknologi digital dalam mengoptimalkan kualitas layanan, seperti pemanfaatan digitalisasi dokumen dan kanal digital.

C. RENCANA AKSI

Kementerian Sekretariat Negara akan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan secara rutin setiap tahun, khususnya yang terkait dengan optimalisasi penyelenggaraan FKP yang dilakukan oleh UPP di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Seluruh instansi juga akan menindaklanjuti setiap hasil dan rekomendasi dari pelaksanaan FKP. Tindak lanjut perbaikan yang dilakukan terkait pengembangan fitur aplikasi untuk pelayanan inklusif, pemanfaatan media sosial dalam promosi aplikasi yang ada di Kementerian Sekretariat Negara.

D. KESIMPULAN

FKP menjadi media informasi, diskusi, sekaligus evaluasi bagi penyelenggara layanan, masyarakat dan seluruh stakeholder yang terlibat, sehingga forum ini menjadi amat penting dilakukan secara berkelanjutan. Penyelenggaraan FKP di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara telah berjalan dengan baik dan untuk selanjutnya seluruh UPP akan melangkah untuk menyelesaikan masalah pelayanan yang ada dan merealisasikan rencana aksi yang disusun demi peningkatan kualitas pelayanan publik.

FKP yang telah dilaksanakan diharapkan menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan dapat memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. FKP juga diharapkan tidak sekedar membahas reviu standar pelayanan, namun dapat menjadi media untuk menemukan dan mengembangkan ide-ide inovasi pelayanan publik dengan tujuan semakin memberi kemudahan bagi pengguna layanan dan masyarakat pada umumnya.

LAMPIRAN I Matriks Pelaksanaan FKP Tahun Berjalan

MATRIKS PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

1. Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Wakil Presiden

No.	Sumber Input	Bentuk Penyelenggaraan	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Tim FKP	Pihak yang Terlibat	Hasil/Kesimpulan/Rekomendasi
1	Pelaksanaan FKP	Luring tatap muka	Meningkatkan pelayanan pers dan media yang diselenggarakan oleh seluruh pegawai di Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Wakil Presiden	Evaluasi permasalahan pelayanan serta pertukaran pemikiran secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan masyarakat/pemangku kepentingan	03 Oktober 2025	Ada	Pegiat Media Sosial dan Pengamat/Tenaga Ahli Media Wakil Presiden	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya kesesuaian gaya komunikasi ciri khas akun resmi dengan karakter platform distribusi: pengelola media belum mampu membedakan <i>tone</i>, <i>gaya visual</i>, dan fungsi strategis akun resmi di media sosial, sehingga pesan tidak tersampaikan optimal dan kesempatan memperluas jangkauan audiens kurang dimanfaatkan

No.	Sumber Input	Bentuk Penyelenggaraan	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Tim FKP	Pihak yang Terlibat	Hasil/Kesimpulan/Rekomendasi
								<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan pemahaman mengenai perilaku dan psikologi audiens digital: gaya konsumsi konten singkat yang menuntut dinamika cepat belum sepenuhnya dipahami, termasuk pentingnya <i>framing</i> dan <i>angle</i> untuk membangun kredibilitas dan identitas akun. Unsur penting belum diterapkan secara konsisten dalam produksi konten Tantangan dalam manajemen produksi konten yang efisien: <i>workflow</i> belum terstruktur, peran sering tumpang tindih, serta kurangnya pustaka digital menghambat proses produksi berkelanjutan

2. Pusat Pembinaan Penerjemah, Deputi Bidang Administrasi Aparatur

No.	Sumber Input	Bentuk Penyelenggaraan	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Tim FKP	Pihak yang Terlibat	Hasil/Kesimpulan/Rekomendasi
2	Pelaksanaan FKP	Hybrid (secara luring tatap muka dan daring melalui zoom meeting)	Peluncuran Jurnal Penerjemah Online tahun 2025	Dialog, diskusi, pertukaran pemikiran secara partisipatif untuk meningkatkan pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah	29 Juli 2025	Ada	Pejabat Fungsional Penerjemah, perwakilan instansi pengguna, perwakilan organisasi profesi Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia (IPPI), dan pakar/akademisi	<ul style="list-style-type: none"> Kuota peserta pelatihan terbatas: akibat adanya efisiensi anggaran berdampak pada penyelenggaraan pelatihan sehingga diubah melalui sistem daring, namun ada beberapa rencana penyelenggaraan pelatihan harus ditangguhkan penyelenggarannya dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan dan urgensi. Jumlah maksimal peserta dalam satu sesi pelatihan adalah sebanyak 20 s.d. 25 peserta untuk mengoptimalkan kualitas pelatihan bagi peserta

No.	Sumber Input	Bentuk Penyelenggaraan	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Tim FKP	Pihak yang Terlibat	Hasil/Kesimpulan/Rekomendasi
								<ul style="list-style-type: none"> Jenis pelatihan non-Inggris: kurangnya variasi jenis pelatihan yang tersedia dan jumlahnya masih sangat terbatas, serta belum mampu menjawab kebutuhan yang beragam dari masing-masing instansi. Sehingga perlu upaya untuk memperluas cakupan dan frekuensi pelatihan bahasa asing lainnya secara lebih merata dan berkelanjutan Digitalisasi: transformasi dengan mengubah format sertifikat dan jurnal ke dalam bentuk digital sebagai upaya dalam efisiensi anggaran, efektivitas distribusi, serta kemudahan akses oleh penerima di berbagai daerah

No.	Sumber Input	Bentuk Penyelenggaraan	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Tim FKP	Pihak yang Terlibat	Hasil/Kesimpulan/Rekomendasi
								<ul style="list-style-type: none"> Penambahan mitra pelaksana: adanya keterbatasan sumber daya pengajar internal dan kebutuhan untuk memperluas cakupan pelatihan, sehingga dibutuhkan kerja sama dengan lebih banyak mitra pelaksana untuk memperluas jejaring kelembagaan dan memperkaya variasi pelatihan, khususnya dalam bidang kebahasaan dan penerjemahan, serta membuka peluang bagi pertukaran keilmuan, riset terapan, dan pengembangan modul pelatihan yang relevan dengan kebutuhan jabatan fungsional penerjemah di instansi pemerintah

3. Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan, Deputi Bidang Administrasi Aparatur

No.	Sumber Input	Bentuk Penyelenggaraan	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Tim FKP	Pihak yang Terlibat	Hasil/Kesimpulan/Rekomendasi
3	Pelaksanaan FKP	Luring tatap muka	Sosialisasi komunikasi akun media sosial Biro APP dan aplikasi SIAPP kepada civitas akademika Universitas Mercu Buana Jakarta	Evaluasi konten media sosial Biro APP dan kerja sama riset pemanfaatan media digital oleh pemerintah, antara Universitas Mercu Buana Jakarta dan Biro APP	20 Februari 2025	Ada	Pakar dan akademisi dalam bidang Ilmu Komunikasi, serta mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi pemanfaatan SIAPP terkendala literasi digital yang masih rendah dari pengguna layanan Biro APP dan kurangnya sosialisasi layanan. Hal ini berdampak pada kurangnya pengetahuan dan pemahaman para PNS terkait pelayanan di Biro APP Pemanfaatan kanal digital, seperti website, media sosial, dan platform komunikasi publik lainnya, belum tersosialisasi secara luas, sehingga informasi layanan belum tersampaikan secara luas dan terukur

No.	Sumber Input	Bentuk Penyelenggaraan	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Tim FKP	Pihak yang Terlibat	Hasil/Kesimpulan/Rekomendasi
								<ul style="list-style-type: none"> Konten informasi yang dibuat oleh Biro APP belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan informasi masyarakat. Diperlukan strategi komunikasi yang lebih terarah dan responsif untuk mengemas informasi yang harus disampaikan ke masyarakat sesuai kebutuhan mereka Evaluasi berbasis data mengenai jangkauan, relevansi pesan, dan respons publik belum dilakukan secara rutin. Evaluasi ini penting untuk mendapatkan pengembangan konten informasi yang berbasis kebutuhan dan memiliki jangkauan yang luas

4. Biro Personel TNI dan Polri, Sekretariat Militer Presiden

No.	Sumber Input	Bentuk Penyelenggaraan	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Tim FKP	Pihak yang Terlibat	Hasil/Kesimpulan/Rekomendasi
4	Pelaksanaan FKP	Luring tatap muka	Rapat pembahasan tentang perubahan tahun lahir pada akte kelahiran untuk memberikan penjelasan terkait pelaksanaan perubahan data pokok pegawai di lingkungan TNI & Polri	Pembahasan tentang perubahan tahun lahir pada akte kelahiranIrjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum.	20 Agustus 2025	Ada	Perwakilan dari instansi/lembaga terkait, serta <i>stakeholder</i> pengguna layanan	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan Tahun lahir tidak semata-mata mengacu pada putusan pengadilan: bahwa usia pegawai negeri untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal lahir yang disebutkan pada pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri menurut bukti-bukti yang sah Perubahan nama dan jenis kelamin, karena tidak berdampak pada Batas Usia Pensiun (BUP) ASN, setelah ada penetapan pengadilan maka akan langsung ditinjau dan difasilitasi oleh BKN

No.	Sumber Input	Bentuk Penyelenggaraan	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Tim FKP	Pihak yang Terlibat	Hasil/Kesimpulan/Rekomendasi
								<ul style="list-style-type: none"> • Apabila perubahan difasilitasi oleh BKN, BKN akan menerbitkan surat penetapan untuk menjadi dasar seorang pegawai dapat bekerja kembali dan sebagai pegangan pada Kementerian Keuangan terkait hak-hak keuangannya. Penetapan tersebut tidak merubah data yang sebelumnya akan tetapi disebutkan bahwa apabila ada data yang berbeda agar dibaca sesuai dengan surat penetapan

5. Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Sekretariat Kementerian

No.	Sumber Input	Bentuk Penyelenggaraan	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Tim FKP	Pihak yang Terlibat	Hasil/Kesimpulan/Rekomendasi
5	Pelaksanaan FKP	Hybrid (secara luring tatap muka dan daring melalui zoom meeting)	Diskusi Standar Pelayanan Administrasi PDNL termasuk waktu layanan, persyaratan, biaya non-tarif, mekanisme perizinan, dan kanal layanan	Evaluasi Implementasi Aplikasi SIMPEL dan Digitalisasi Layanan masukan terkait <i>user experience</i> , efektivitas, verifikasi dokumen, dan integrasi sistem	06 Januari s.d. 07 Maret 2025	Ada	Perwakilan dari instansi/lembaga terkait, serta <i>stakeholder</i> pengguna layanan	<ul style="list-style-type: none"> Pemahaman dan Interpretasi Kebijakan Masih Beragam, baik tatap muka maupun daring sehingga belum terinternalisasi menjadi standar internal K/L, maka diperlukan pendampingan dari kebijakan ke prosedur teknis Resistensi Implementatif dan Tantangan Teknis, dimana beberapa K/L menganggap pembatasan delegasi, selektivitas izin, dan rasionalisasi kegiatan berpotensi menghambat agenda diplomasi sektoral

No.	Sumber Input	Bentuk Penyelenggaraan	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Tim FKP	Pihak yang Terlibat	Hasil/Kesimpulan/Rekomendasi
								<ul style="list-style-type: none"> • Kesulitan Mengukur Manfaat Kegiatan Luar Negeri, dengan belum adanya sistem evaluasi <i>outcome</i> PDLN dimana masih rendahnya K/L menyampaikan laporan PDLN nya • Dibutuhkan sistem monitoring Kebijakan Efisiensi antara Kemensetneg dengan Kemenkeu, serta otomasi proses administratif ke sistem manajemen kinerja dan evaluasi manfaat PDLN

LAMPIRAN II Matriks Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun 2024

MATRIKS HASIL TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK TAHUN 2024

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

No.	Unit Pelayanan Publik	Rekomendasi dan Target Penyelesaian	Realisasi Tindak Lanjut
1	Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI), Sekretariat Wakil Presiden	BPMI melakukan update informasi terkait agenda kegiatan Wakil Presiden, baik insidental maupun seremonial	BPMI secara bertahap membuka kesempatan terhadap wartawan untuk meliput langsung kegiatan Wakil Presiden, baik di dalam kota, maupun di luar kota. Informasi kegiatan Wakil Presiden dibagikan melalui grup media atau kontak koordinator-koordinator peliputan media
		BPMI menyampaikan kebutuhan media akan pernyataan Wakil Presiden	BPMI menyiapkan skenario keterangan pers dalam setiap titik kunjungan Wakil Presiden di daerah/luar kota, dan mengomunikasikannya dengan Tim Sekretaris Pribadi Wakil Presiden
		BPMI menyampaikan kebutuhan media akan pernyataan pejabat lain (apabila Wakil Presiden tidak ada pernyataan)	BPMI menjalin komunikasi dengan pejabat pendamping Wakil Presiden saat bertugas di daerah, dan memprotapkan wawancara pejabat tersebut guna memperkaya bahan peliputan
		BPMI mengupayakan sharing materi video dan foto yang lebih cepat	Proses pengelahan materi video dan foto dilakukan tanpa menunggu seluruh rangkaian kegiatan berakhir dan dibagikan dalam link drive untuk mempermudah distribusi.

No.	Unit Pelayanan Publik	Rekomendasi dan Target Penyelesaian	Realisasi Tindak Lanjut
		BPMI menyampaikan kebutuhan media untuk berinteraksi langsung dengan Wakil President (sesi <i>doorstep</i> langsung/video)	BPMI secara bertahap membuka kesempatan terhadap wartawan untuk meliput langsung kegiatan Wakil Presiden, baik di dalam kota, maupun di luar kota. Informasi kegiatan Wakil Presiden dibagikan melalui grup media atau kontak koordinator-koordinator peliputan media
		BPMI mengakomodir calon pemegang ID Pers Istana yang telah diverifikasi ke dalam Grup Media Resmi	BPMI memastikan seluruh wartawan pemegang ID Pers Istana terlibat dalam grup wartawan
2	Pusat Pembinaan Penerjemah, Deputi Bidang Administrasi Aparatur	Melakukan pembahasan secara mendalam dengan pemangku kepentingan internal Setkab dan para pakar dan/atau praktisi di bidang penerjemah guna merumuskan standardisasi dan kriteria kompetensi penerjemah yang terukur dengan kebutuhan JFP berdasarkan berbagai jenis teks terjemahan	<ul style="list-style-type: none"> • Telah disusun standar kompetensi penerjemah • Telah disusun kamus kompetensi teknis jabatan fungsional penerjemah

No.	Unit Pelayanan Publik	Rekomendasi dan Target Penyelesaian	Realisasi Tindak Lanjut
3	Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan (Biro APP), Deputi Bidang Administrasi Aparatur	Pemberlakuan distribusi Salinan dan Petikan Keppres secara digital, sebagaimana diamanatkan SE DAA Nomor 1 Tahun 2024, belum dilaksanakan secara keseluruhan untuk layanan pengangkatan dan pemberhentian JFKU, kenaikan pangkat dan pemberhentian PNS, serta khususnya untuk layanan pemberhentian masih perlu penyempurnaan karena menyebabkan waktu pelayanan yang lebih lama dan melalui beberapa tahap	Implementasi Distribusi Dokumen Digital Salinan dan Petikan Keppres telah diberlakukan terhitung tanggal 1 Februari 2025 untuk semua layanan yang tercantum dalam SE DAA Nomor 1 Tahun 2024
		Biro APP telah menyiapkan beberapa video tutorial yang dapat diakses oleh seluruh pengguna layanan, termasuk penyandang disabilitas tuli dan netra, namun belum diimplementasikan pada seluruh laman aplikasi SIAPP	Biro APP telah mengidentifikasi kebutuhan layanan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan jenis disabilitas yang tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Setelah itu, fitur, konten, dan tampilan website SIAPP akan diperbaharui melalui pengembangan aplikasi SIAPP Tahun 2025 agar lebih mudah diakses dan ramah bagi semua pengguna

No.	Unit Pelayanan Publik	Rekomendasi dan Target Penyelesaian	Realisasi Tindak Lanjut
		Mengintegrasikan layanan secara keseluruhan antara SIAPP dengan SIASN dan mengadopsi inovasi fitur baru di kedua aplikasi yaitu fitur verifikasi keabsahan di SIAPP dan fitur pembacaan dokumen yang dipersamakan dengan metadata	Integrasi layanan SIAPP dengan SIASN secara menyeluruh dilaksanakan pada Semester II Tahun 2025, termasuk pengadopsian fitur verifikasi keabsahan dokumen dan metadata yang terstandar di kedua sistem untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi layanan
		Menindaklanjuti rekomendasi narasumber dalam mengembangkan aplikasi SIAPP dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan	Pengembangan fitur berdasarkan rekomendasi narasumber pada aplikasi SIAPP, khususnya pada menu cek status usulan, dengan penambahan kolom informasi kesalahan/kekurangan data atau dokumen. Selain itu, telah dipertimbangkan penggunaan NRP sebagai opsi input bagi usulan dari TNI/Polri atau PPPK, serta optimalisasi tampilan aplikasi agar lebih ramah bagi pengguna perangkat <i>mobile</i>
		Meningkatkan pemanfaatan sosial media dalam menambah engagement pengguna terhadap aplikasi SIAPP	Penambahan <i>follower/subscriber</i> aplikasi SIAPP dalam rangka meningkatkan <i>engagement</i> pengguna dengan menggunakan metode AISAS (<i>Attention, Interest, Search, Action, and Share</i>)

No.	Unit Pelayanan Publik	Rekomendasi dan Target Penyelesaian	Realisasi Tindak Lanjut
		Melaksanakan kerja sama dengan Perguruan Tinggi melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat untuk mensosialisasikan aplikasi SIAPP	Optimalisasi sosialisasi SIAPP melalui media sosial dan kerja sama dengan Perguruan Tinggi telah dilaksanakan pada tahun 2025 dengan salah satu universitas di Jakarta, Universitas Mercu Buana, yang tertuang pada Nota Kesepahaman antara Universitas Mercu Buana dengan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia tentang Program Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat
		Meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan bagi seluruh ASN, misal bagi ASN yang tinggal di daerah pedalaman atau perbatasan	Melaksanakan komunikasi dan kerja sama dengan instansi daerah pedalaman atau perbatasan melalui berbagai media komunikasi
		Meningkatkan keamanan data di aplikasi SIAPP	Data SIAPP tersimpan dalam server yang dimiliki oleh Kemensetneg, tidak disimpan di Pusat Data Nasional. Selain itu, telah dilaksanakan banyak usaha dalam memperkuat keamanan aplikasi SIAPP, di antaranya adalah menerapkan two-factor authentication dan fitur keabsahan Salinan dan Petikan Keputusan Presiden, serta telah menjalin kerja sama dengan BSSN terkait keamanan data dan aplikasi

No.	Unit Pelayanan Publik	Rekomendasi dan Target Penyelesaian	Realisasi Tindak Lanjut
4	Biro Personel TNI dan Polri, Sekretariat Militer Presiden	Menyediakan pelatihan yang komprehensif mengenai peran dan tanggung jawab PIC kepada semua peserta, baik yang berasal dari luar daerah, maupun dari dalam 1 daerah	Membuat SOP pelayanan yang menjelaskan peran dan tanggung jawab PIC, serta dapat disebarluaskan kepada semua peserta
		Menyusun materi informasi tentang kegiatan secara garis besar dan mendistribusikannya secara efektif kepada semua peserta	Menyediakan laporan kegiatan sebagai sumber informasi yang dapat diakses secara terbuka oleh peserta melalui kanal informasi resmi Biro Personel TNI dan Polri
		Melakukan penyuluhan mengenai peraturan yang relevan dan menyediakan akses mudah kepada peserta	Memperbanyak kanal informasi yang dapat diakses oleh peserta, termasuk di dalamnya media sosial, sebagai media berbagi informasi yang relevan

No.	Unit Pelayanan Publik	Rekomendasi dan Target Penyelesaian	Realisasi Tindak Lanjut
5	Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Sekretariat Kementerian	Pada prinsipnya Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kemensetneg berusaha memberikan layanan PDLN yang terbaik kepada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Bawa catatan-catatan yang kurang baik pada tahun 2023, untuk diperbaiki sehingga PDLN yang dilaksanakan akan semakin bermanfaat, efektif, dan efisien	Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri setiap tahunnya akan melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait layanan PDLN yang dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan, baik dari pengguna, maupun dari instansi terkait
		Pemahaman atas prosedur administrasi perjalanan dinas luar negeri sangat diperlukan dalam rangka bagian untuk mempercepat layanan surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri; diharapkan masing-masing Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah mau berbenah untuk lebih baik dan patuh pada prosedur layanan	Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri akan mempublikasikan prosedur dan tata cara pelaksanaan pelayanan melalui kanal media resmi sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
		Kolaborasi dan komunikasi efektif dengan Kementerian Luar Negeri, dalam hal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mengalami kendala koordinasi dengan KBRI/KJRI	Kolaborasi dan kerja sama dengan instansi terkait terus dilakukan oleh Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri untuk mewujudkan kualitas layanan terbaik



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
Biro Organisasi, Tata Laksana, Hukum, dan Reformasi Birokrasi

LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK 2025 ↗